

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Partisipasi politik menjadi fondasi praktik demokrasi perwakilan elektoral. Pemilu dan partisipasi pemilih merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Di sini, demokrasi bisa dipahami suatu pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Demokrasi dalam pendekatan normatif menekankan pada ide dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023).

Menurut dari jurnal Nasution (2023) menjelaskan tentang menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap berbagai bentuk isu politik dan kejenuhan masyarakat proses demokratisasi yang belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Kedua, Kepercayaan terhadap institusi politik, Kepercayaan terhadap institusi politik seperti KPU, partai politik, dan pemerintah sangat mempengaruhi partisipasi politik. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi ini berkontribusi pada menurunnya partisipasi dalam pemilu. Ketiga, Peran media sosial, Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan mobilisasi pemilih. Namun, meskipun media sosial dapat meningkatkan pengetahuan politik, hal ini tidak selalu diterjemahkan menjadi partisipasi politik yang nyata. Terakhir adalah Faktor sosial dan ekonomi termasuk pendapatan dan status pekerjaan, juga mempengaruhi partisipasi politik. Masyarakat dengan status ekonomi yang lebih baik cenderung lebih berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, dan partisipasi pemilih, terutama dari kalangan mahasiswa, memegang peranan penting dalam menentukan arah demokrasi suatu negara. Istilah pemilih muda muncul dalam pemilihan umum (pilkada) sebagai salah satu langkah yang tepat bagi generasi muda bagi pemilih yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda latar belakang, pengalaman, dan tantangan pemilih dari generasi sebelumnya. Sebab, suara para pemilih pemula ini memang perlu diarahkan sebaik mungkin, supaya tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehingga pemilihan umum (pemilu) harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut Nasution (2023).

Di sisi lain, partisipasi politik dari masyarakat digunakan sebagai salah satu landasan atas dasar wujud perwujudan negara demokrasi, di mana rakyat terlibat langsung dalam proses pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, ciri mendasar dari keberadaan negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum ini. Hal ini karena pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pesta rakyat demokrasi untuk mewujudkan kemauan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang cocok untuk menduduki jabatan berdasarkan amanat yang diberikan sebelumnya. Dalam pemilihan umum (pemilu), untuk Misalnya, partisipasi politik sangat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap calon pasangan yang telah terpilih Nasution (2023).

Kemudian dalam pemilu (pemilihan umum) tentu ada juga yang menjadi pemilih pemula, pemilih pemuda tersebut adalah warganegara yang potensial menjadi penggerak sistem politik Indonesia. Para calon pemilih pemula yang umumnya masih duduk di tingkat akhir sekolah lanjutan tingkat atas, menyerap kesan-kesan politik negara, lalu menjadikannya bahan evaluasi untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Bagaimana nasib sistem politik Indonesia di masa mendatang salah satunya akan dipengaruhi oleh partisipasi politik mereka ini. KPU menyadari akan pentingnya sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi. Terutama dengan adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi pemilih pemula oleh kalangan politisi maupun partai politik.

Pemilih pemula adalah mereka yang masuk usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17 – 21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulus SMA Dwi (2019).

Pemberitaan politik di media sosial mempengaruhi cara pandang remaja sebagai pemilih pemula pada pemilu, terlebih lagi banyak pemberitaan tentang politik di Indonesia yang bernada negatif. Buruknya citra negatif parpol atau partai politik disebabkan karena pemberitaan di media sosial. Hal ini karena kegiatan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh parpol atau partai politik dapat menimbulkan persepsi negatif media khususnya media massa, misalnya, bagaimana kepentingan parpol yang nyata kelihatan ketika pemilihan kepala daerah dan bagaimana politik uang (*money politics*) tidak tanggung-tanggung dilakukan untuk meraih ambisinya.

Perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang ikut serta dalam kegiatan politik, secara lebih khusus, merupakan keikutsertaan dalam pemilihan umum, pilihan atas partai politik tertentu, pilihan atas calon jabatan politik tertentu, dan pilihan atas isu politik tertentu. Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Wardhani (2018).

Ekman & Amnå dalam penelitian Rangga, F (2022) mendefinisikan partisipasi politik merupakan semua tindakan masyarakat yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan hasil politik. Ekman & Amnå dalam penelitian Rangga, F (2022) terus menekankan bahwa melalui tindakan ini, membuat masyarakat dapat bertujuan dalam membuat dampak pada hasil politik di masyarakat, mempengaruhi keputusan yang berdampak pada urusan publik, serta proses politik. Beralih ke perilaku politik yang nyata, idenya adalah untuk menekankan bahwa apa yang kita sebut sebagai “Partisipasi Politik” yang sebenarnya adalah semua tindakan yang diarahkan untuk mempe-

ngaruhi keputusan pemerintah dan hasil politik.

Partisipasi ini berorientasi pada tujuan atau rasional, jika anda mau. Partisipasi ini dapat diamati dan dapat diukur secara langsung. Partisipasi Politik berkaitan dengan keinginan warga negara biasa untuk mempengaruhi politik dan hasil politik dimasyarakat, atau keputusan yang memengaruhi urusan publik Ekman & Amnå dalam penelitian Rangga, F (2022).

Dalam perpartisipasi politik tentunya ada juga yang menjadi pemilih pemula yang berperan penting menentukan arah perubahan kemajuan Indonesia memiliki potensi akan berhasil memenangkan Pemilu yang akan berlangsung. Dengan jumlah perkiraan pemilih pemula yang besar maka jelas akan berpotensi memenangkan Pemilu, sehingga sayang rasanya jika suara dari pemilih pemula ini diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu dan sepatutnya harus mampu untuk dirangkul agar pemilih pemula aktif dalam partisipasi politik yang dalam hal ini berpartisipasi memilih dan tidak golput mengingat ini merupakan suatu peluang untuk mencapai kemenangan.

Pada pemilu 2024, pemilih milenial adalah pemilih yang terbanyak dengan jumlah mencapai sekitar 53-55%. Hasil survei centre for strategic and International studies (SCIS) menunjukkan bahwa presentase partisipasi pemilih muda di Indonesia meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 mencapai sekitar 81%, meningkat sekitar 10% dibandingkan pemilu 2014 yang mencapai 70% Kompas (2019). Sedangkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu 2019 mencapai 91,3% meningkat sekitar 5,4% dibandingkan pemilu 2014 yang mencapai 85,9% Kompas dan kumparan (2023).

Menurut Perangin-angin, L. L., & Zainal, M. (2018) salah satu kegiatan yang membantu para pemilih pemula dalam mengambil keputusan politik adalah adanya diskusi tentang politik dengan keluarga dan keluarga besar. Semua partisipan mengaku diskusi antar anggota keluarga berjalan dengan baik, ada waktu-waktu mereka bisa membicarakan banyak hal dengan orang tua, tetapi sayangnya diskusi politik hampir tidak pernah dilakukan. Namun, ada sebagian kecil partisipan mengaku berdiskusi politik dengan orang tua, bukan hanya

tentang isu-isu politik yang sedang hangat diberitakan oleh media lain, tetapi juga mereka bisa belajar praktek politik lewat bimbingan orang tua.

Undang-undang mengartikan pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU 7/2022). Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 2008 pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menjelaskan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Kisaran usia pemilih pemula yakni 17-21 tahun. Rata-rata kelompok ini baru menyelesaikan masa studi SMA atau sedang duduk di bangku perkuliahan. Para siswa/siswi yang sudah memenuhi syarat diatas umur 17 tahun yang sudah memiliki KTP ia bisa berpartisipasi untuk menjadi pemilih pemuda yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman dekat. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita ditelevisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

Menurut Fitriah (2014) nilai personal akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik bila dibersamai dengan efikasi politik internal. Nilai menjadi suatu landasan yang mengarahkan tingkah laku pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Tingkah laku tersebut dilatarbelakangi oleh gagasan ideologi individu dalam menentukan pilihan politik untuk memilih model pemerintahan yang dirasa paling ideal merepresentasikan nilai personal individu.

Schwartz (1992) mencakup dua aspek konseptual, keamanan pribadi (keselamatan untuk diri sendiri) dan keamanan masyarakat (stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat). Sebuah studi di Italia, Spanyol, dan Jerman memisahkan aspek-aspek keamanan ini ketika memprediksi persepsi tentang konsekuensi imigrasi (Vecchione, Caprara, Schoen, Gonzalez-Castro, & Schwartz, dalam proses penerbitan). Dalam model persamaan struktural, keamanan masyarakat secara kuat memprediksi persepsi bahwa imigrasi

memiliki konsekuensi negatif di ketiga negara, sedangkan keamanan pribadi tidak memprediksi sama sekali. Hal ini mengungkapkan bahwa aspek nilai-nilai keamanan yang menyebabkan persepsi imigrasi sebagai ancaman adalah perhatian terhadap dampak imigrasi terhadap stabilitas dan ketertiban masyarakat, bukan perhatian terhadap keselamatan pribadi seseorang.

Schwartz (1992) berusaha mengidentifikasi seperangkat nilai dasar yang komprehensif yang diakui di semua masyarakat. Ia mendefinisikan nilai dasar sebagai tujuan trans-situasional, yang bervariasi dalam kepentingannya, yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan seseorang atau kelompok. Ia ber teori bahwa nilai-nilai dasar diorganisasikan ke dalam sistem yang koheren yang mendasari dan dapat membantu menjelaskan pengambilan keputusan, sikap, dan perilaku individu. Struktur yang koheren ini muncul dari konflik sosial dan psikologis atau keselarasan antara nilai-nilai yang dialami orang ketika mereka membuat keputusan sehari-hari (Schwartz, 1992, 2006).

Internal political efficacy merupakan keyakinan tentang kompetensi seseorang untuk memahami dan berpartisipasi secara efektif dalam politik Craig dalam penelitian Rangga, F (2022). *Internal political efficacy* terdiri dari *self-perception* yang meliputi: pengetahuan politik, pemahaman politik, kepercayaan diri untuk terlibat dalam urusan politik, dan kemampuan dalam urusan politik (Craig et al. 1990). Persepsi kompetensi politik ini dibangun dalam kerangka yang lebih luas dari kompetensi sosial individu. Craig et al. (1990) lebih mengedepankan dikotomi dalam dimensi external antara lain *regime based efficacy* (cara memerintah) dan *incumbent based efficacy* (pemegang jabatan). Efikasi berbasis rezim berhubungan dengan persepsi respon sistem yang difasilitasi oleh peraturan dan prosedur. Efikasi berbasis incumbent berkaitan dengan persepsi respon di kantor politik atau pemerintah.

Political Efficacy adalah keyakinan bahwa tindakan politik individu dapat memiliki, atau tidak memiliki dampak pada proses politik. Konsep tersebut digunakan untuk mengukur dua komponen yaitu *internal political efficacy*, dan *external political efficacy* Craig et al., (1990).

Kesadaran mengenai pentingnya peran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara tidak hanya pada taraf pengetahuan (kognitif) melainkan harus tumbuh menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya dapat mempengaruhi atau berdampak pada proses politik di Negaranya, Keyakinan bahwa akan lebih bermanfaat jika dirinya turut melakukan tugas kewarganegaraannya, Keyakinan ini disebut *political efficacy* (efikasi politik).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 desember 2024 pada 5 mahasiswa dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa tersebut rata-rata masih ada nya kurang kepercayaan dalam dirinya, namun dia sangat ambisi dalam hal apapun. Bisa disimpulkan dari keseluruhan terkait Nilai Personal (*Personal Value*), subjek secara konsisten menunjukkan penghargaan tinggi terhadap pengembangan diri melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan, serta kemandirian dalam menentukan pilihan hidup. Mereka termotivasi oleh pencapaian dan keinginan untuk menjadi versi terbaik diri, sambil juga mencari kesenangan dan pengalaman baru. Nilai kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sangat menonjol, diiringi oleh penghargaan pada tradisi, kejujuran, dan keadilan, serta keinginan untuk memperlakukan semua orang secara adil dan menerima perbedaan. Subjek juga mengakui pentingnya kesejahteraan finansial dan status sebagai sarana untuk memberi dampak positif, serta menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks Efikasi Politik (*Political Efficacy*), subjek memiliki efikasi internal yang bervariasi namun cenderung positif. Meskipun mengakui kurang mendalami politik dan masih dalam proses belajar, mereka merasa mampu memahami poin-poin dasar dan percaya pada aksesibilitas informasi. Adanya minat pribadi turut mendukung keyakinan mereka untuk terus mengembangkan pemahaman politik. Untuk efikasi eksternal, subjek sangat menghargai hak berpendapat sebagai pilar demokrasi dan percaya bahwa setiap warga negara berhak mengkritik pemerintah. Namun, pandangan mereka terhadap responsivitas pejabat cenderung realistis dan sedikit kritis, menyadari bahwa tidak semua pejabat sepenuhnya peduli atau maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat. Adapun Partisipasi Politik (*Political Participation*), partisipasi subjek umumnya bersifat

pasif dan terfokus pada konsumsi informasi melalui media sosial. Meskipun menggunakan hak pilih dalam pemilu, keputusan memilih seringkali didasarkan pada pengetahuan dasar atau preferensi yang sudah ada. Tingkat aktivisme subjek cenderung rendah, dengan kurangnya minat pada diskusi mendalam, forum politik, atau bentuk kritik kebijakan yang terperinci. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya politik dan keinginan untuk tidak "buta politik," hal ini belum tentu diterjemahkan ke dalam partisipasi aktif yang lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara *personal values* dengan partisipasi politik pemilih pemula ?
2. Apakah ada hubungan antara *political efficacy* dengan partisipasi politik pemilih pemula ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *personal value* dengan *poliical efficacy* terhadap partisipasi politik pemilih pemula ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui hubungan *personal values* dengan partisipasi pemilih pemuda pada Mahasiswa/siswi Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Mengetahui hubungan *political efficacy* dengan partisipasi pemilih pemuda pada Mahasiswa/siswi Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Mengetahui pengaruh *personal Values*, *political efficacy*, terhadap partisipasi pemilih pemuda pada Mahasiswa/siswi Universitas Islam 45 Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan ilmu pada bidang Psikologi Sosial terkait *Personal Values*, *Political Efficacy*, terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada remaja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya baik dari aspek variabel serta metode dalam penelitian.

